

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Muhammad Arif Ardiansyah (2021) “ Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) MP Dalam Meningkatkan Pendapatan Peminjam Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu melalui indikator pengukuran efektivitas ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, pemantauan program dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara tersebut.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa efektivitas pinjaman modal usaha DAPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan peminjam pada kelompok pinjaman Saiyo Sakato Tigo belum begitu efektif karena masih terdapat 4 orang dari 18 orang anggota kelompok yang menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan konsumtif serta adanya ketidaktepatan penyaluran dana yang disalurkan ke PNS yang seharusnya dana pinjaman ini ditujukan ke Rumah Tangga Miskin (RTM), sosialisasi program yang dilakukan hanya ditingkat kecamatan

saja sedangkan untuk sosialisasi secara langsung ke Nagari / Jorong tidak ada dilakukan karena memang tidak mempunyai tim untuk sosialisasi tersebut, pencapaian tujuan program yang belum begitu maksimal, pemantauan terhadap anggota peminjam yang belum maksimal, dikarenakan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh UPK Batu Batikam. Sedangkan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam terdapat 2 hal yang berbenturan dengan konsep ekonomi Islam yaitu adanya penyalahgunaan dana pinjaman dari DAPM Mandiri Perdesaan oleh empat orang anggota kelompok serta kurangnya peran pengarahan dan pengawasan terhadap usaha apa yang dibuat oleh si peminjam, ini merupakan suatu perbuatan pembohongan dan ketidak tepatan janji yang dilakukan oleh empat orang anggota kelompok peminjam tersebut. Pembohongan dan ketidak tepatan janji serta kurangnya pengawasan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dalam Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti yakni Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yaitu pada program simpan pinjam perempuan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya fokus pembahasan mengenai Efektivitas pinjaman ditinjau dari perspektif ekonomi islam, sedangkan pada

penelitian ini akan membahas peran pinjaman modal dana Amanah pemberdayaan masyarakat.

2. Agus Ferianto (2020) “Analisis Manfaat Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, populasi yang digunakan dalam penelitian berjumlah 158 dengan pengambilan sampel sebesar 10%, dari jumlah populasi yaitu 16 responden. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Random Sampling, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan metode analisa yang digunakan dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Proses pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri bermanfaat dalam peningkatan usaha masyarakat ,dengan pengembangan dana pinjaman sebagai permodalan masyarakat untuk mengembangkan usaha berupa usaha mickro, baik perdagangan, pertanian, peternakan dan lainnya, dengan pelatihan penggunaan dana pinjaman dan pemberian bunga ringan yaitu 10% per 10 bulan masyarakat tidak diberatkan, terbukti dengan banyaknya usaha masyarakat yang berkembang dengan adanya pinjaman PNPM Mandiri,. Kedua , Penerepan dana pinjaman PNPM Mandiri masih belum sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam, karena dalam pemberian pinjaman PNPM Mandiri masih

menggunakan sistem bunga dengan penetapan bunga 10% dari jumlah pinjaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian sebelumnya yaitu manfaat pinjaman program nasional masyarakat dan peningkatan usaha masyarakat dan pada penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Susilistiawati (2011) “Analisis Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MP) terhadap Peningkatan Pendapatan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Asahan”. Sejak tahun 2008 Kabupaten Asahan telah berpartisipasi didalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk mengentaskan kemiskinan. Dan tujuan Penelitian ini adalah untuk 1) Menganalisis pengaruh PNPM - Mandiri Perdesaan di Kabupaten Asahan terhadap pendapatan masyarakat yang menjadi peserta program, 2) Menganalisis dampak PNPM - Mandiri Perdesaan di Kabupaten Asahan didalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, dan 3) Menganalisis dampak PNPM - Mandiri Perdesaan terhadap pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Asahan. Metoda analisis data yang digunakan adalah analisis

deskriptif dan analisis Uji-t SEBELUM dan SESUDAH program dilaksanakan serta metode analisis untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan menurut Economic and Social Commission for Asean and Pasific (ESCAP) dalam Manual Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Asahan belum berjalan dengan optimal, meskipun terjadi peningkatan secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat, baik pada peserta program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) maupun program Infrastruktur. Program SPP mempunyai nilai rata-rata pendapatan rumah tangga sebelum mengikuti program sebesar Rp. 1.887.812,50 dan setelah program Rp. 3.394.062,50, (meningkat 79,79%), dan peserta program yang tergolong dalam rumah tangga miskin sebanyak 9,37%. Dengan menggunakan angka inflasi Kabupaten Asahan Thn 2010 sebesar 13,78%, diperoleh hasil nilai income indicator rumah tangga sebesar 0,0706 (pendapatan rumah tangga meningkat rata-rata sebesar 7,06%). Pada program Infrastruktur rata-rata pendapatan rumah tangga sebelum mengikuti program sebesar Rp. 1.326.229,51,- dan setelah program Rp. 1.751.619,67,- (meningkat 32,07%). Peserta program infrastruktur yang termasuk dalam rumah tangga miskin sebesar 21,31%, dengan menggunakan angka inflasi diperoleh Income indicator sebesar 0,0343 (pendapatan meningkat 3,43%).

Persamaan penelitian ini terletak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang mengalami peningkatan secara signifikan pada program simpan pinjam perempuan.

Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif.

4. Ade Kemala Sari (2015). “Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”. Rata-rata pendapatan masyarakat rumah tangga miskin setelah menjadi penerima manfaat dari program simpan pinjam PNPM mandiri mengalami peningkatan sebesar 137.500 rupiah/bulan dibandingkan rata-rata sebelum menjadi pemanfaat. Peningkatan pendapatan pemanfaat mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Persamaan melalui program PNPM atau yang disebut sekarang DAPM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin yang membutuhkan modal.

Perbedaan yaitu metode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah metode penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian penelitian terdahulu PNPM mandiri tidak memberikan pinjaman modal kepada masyarakat kalangan

menengah hanya diberikan kepada kalangan bawah, sedangkan pada penelitian penulis program PNPM atau yang disebut DAPM memberikan pinjaman kepada masyarakat kalangan menengah tidak hanya masyarakat kalangan bawah (miskin).

5. Wahyu Hamidi (2010) “Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Terhadap pendapatan Masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. Sesuai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerima pinjaman modal untuk kegiatan usaha adalah pada umumnya berpendidikan rendah yaitu banyak tamatan Sekolah Dasar (SD) dan telah lama menjalankan kegiatan usahanya yang mendapat pinjaman dari PNPM. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Persamaanya yaitu dengan adanya program DAPM masyarakat yang kekurangan modal dapat melakukan pinjaman melalui pinjaman dana bergulir sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perbedaannya yaitu penerima pinjaman modal untuk kegiatan usaha adalah pada umumnya berpendidikan rendah yang banyak tamatan (SD) dan dana yang telah menjalankan kegiatan usahanya yang mendapat pinjaman dari PNPM, sedangkan pada penelitian penulis DAPM memberikan pinjaman pada masyarakat kalangan menengah dan kalangan

bawah. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode kuantitatif.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Peran Pinjaman Modal

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Yare, 2021:20).

Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya berjalan berbagai peran.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerja oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan

dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi didudun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi (Pratiwi, 2019).

2. Pinjaman

Pinjaman dapat disamakan dengan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2010:96).

Kitab hukum Undang-undang perdata menjelaskan bahwa pinjaman adalah perjanjian antara pihak yang memberi pinjaman memberikan objeknya kepada pihak peminjam, yang objeknya berupa barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak peminjam akan mengembalikan objek pinjaman dengan jumlah yang sama.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Karena itu, dasar kredit adalah

kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan (Suyatno et al., 2007).

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut PP Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Apa yang telah dijanjikan berupa barang, uang atau jasa. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit adalah pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan dalam islam adalah suatu hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar.

Sebagaimana firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آصْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah 2:245).

Maksud dari firman diatas, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah SWT. Kemudian dia infakkan hartanya dengan niat baik dan tulus, supaya harta itu kembali kepadanya rezeki, kesehatan, dan lain-lain dan dapat melapangkan itu semua dengan kebijaksanaan dan keadilan-Nya. Dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan di akhirat, kemudian dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.

Menurut Kasmir (2010:99) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan disamping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit

dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani baik hak maupun kewajibannya.

- c. Jangka waktu yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk kredit jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- d. Resiko adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit.
- e. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga,

Menurut Kasmir (2010, 103-108) Adapun jenis dan penggolongan kredit. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut

- a. Dilihat dari segi kegunaannya
 - 1) Kredit investasi kredit yang dipergunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - 2) Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misal untuk membeli bahan baku atau untuk membayar gaji pegawai.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

- 1) Kredit produktif kredit yang dipergunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa
- 2) Kredit konsumtif kredit yang dipergunakan untuk konsumtif secara pribadi, misalnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, dan kredit konsumtif lainnya.
- 3) Kredit perdagangan kredit yang dipergunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah kredit yang memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya digunakan untuk investasi.
- 3) Kredit jangka panjang kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- 2) Kredit tanpa jaminan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit pertanian kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- 2) Kredit peternakan dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.
- 4) Kredit pertambangan jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah.
- 5) Kredit pendidikan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Kredit profesi kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Kredit perumahan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

3. Modal

Semua perusahaan yang melakukan kegiatan pasti membutuhkan dana, kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional kegiatan perusahaan maupun untuk investasi. Modal merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli barang dagangan, pembiayaan operasional dan pembiayaan upah lainnya yang berlangsung terus-menerus selama kegiatan jual beli yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan pedagang (Juliansyah & Saraturrahmi, 2018).

Menurut S. Munawir (2010:19) Yang dimaksud dengan modal yaitu modal adalah hak yang dimiliki pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Menurut Riyanto (2010:18) Modal yaitu sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang modal adalah barang-barang dalam perusahaan yang belum digunakan.

Menurut Suparmoko (2010:96) Modal adalah segala bentuk kekayaan berupa barang dan uang yang bisa didapatkan sendiri maupun pihak lain yang berupa pinjaman. Modal terdiri dari:

1. Modal Usaha adalah capital semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung, untuk menambah output.
2. Modal kerja adalah capital yang diperlukan untuk membelanjai operasi sehari-hari atau disebut biaya tetap suatu usaha.

Usaha yang memerlukan jangka waktu lebih Panjang memerlukan modal yang relatif besar pula. Perhitungan terhadap besarnya suatu usaha perlu dilakukan sebelum usaha tersebut dijalankan. Adapun indikator modal usaha adalah sebagai berikut:

1. Struktur permodalan, modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu uang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tertentu likuiditasnya.
2. Pemanfaatan modal tambahan, pengaturan pinjaman modal dari bank atau Lembaga keuangan lainnya harus dilakukan dengan baik. Gunakan modal tambahan sebagaimana tujuan awal, yaitu untuk mengembangkan usaha.
3. Hambatan dalam mengakses modal eksternal, hambatan untuk memperoleh modal eksternal antara lain: sulitnya persyaratan untuk mendapatkan kredit perbankan bagi suatu

usaha seerti kelayakan usaha, rekening 3 bulan harus bagus dan keberadaan aguanan serta lamanya berbisnis, serta teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

4. Keadaan usaha setelah menambahkan modal, tentunya diharapkan setelah menambahkan modal, usaha yang dijalankan lebih berkembang (Fatimah et al., 2021:154).

Menurut (Kasmir, 2010b) Secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*).
2. Kualitatif, merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini adalah melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau (*net working capital*).
3. Fungsional, menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dala memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan perolehan laba perusahaan. Makin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat

meningkatkan perolehan laba, demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, maka laba pun akan menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian.

Modal kerja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan berdasarkan kebutuhan akan modal kerja itu sendiri. Berikut merupakan dua penggolongannya:

1. Modal kerja Permanen (*Permanent Working Capital*). Modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua, yaitu pertama modal kerja primer (*primary working capital*) adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Kedua, modal kerja normal (*normal working capital*) yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Kapasitas normal mempunyai pengertian yang fleksibel menurut kondisi perusahaannya.
2. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*). Modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi tiga macam, pertama modal kerja musiman (*seasonal working*

capital) yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim; kedua modal kerja siklis (cyclis working capital) yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk; dan ketiga modal kerja darurat (emergency working capital) yaitu modal kerja yang besarnya yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya (misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, buruh mogok dan sebagainya) (Riyanto,2011).

2.2.2. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

1. Pengertian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah merupakan kelanjutan dari program pemerintah sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat_Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Program ini bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan keberlanjutan. PNPM-MPd merupakan koreksi terhadap sistem program pembangunan pemerintah terdahulu yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik. PNPM-MPd diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumber daya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan sendiri merupakan program kelanjutan dari program pengembangan kecamatan (PPK). Program PPK ini yang dimulai dengan uji coba di tiga kabupaten yaitu Belu di NTT, Sukoharjo di Jawa Tengah dan Solok di Sumatera Barat sejak tahun 1997 yaitu sejak era orde baru. Karena dianggap berhasil maka uji coba ini diaglat menjadi program pemerintah yang sampai saat ini lokasinya telah mencapai hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jalan yang berliku melalui berbagai dinamika sehingga jadilah yang seperti saat ini.

Adanya program dari pemerintah ini, masyarakat mempunyai harapan dan tekak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dikalangan orang miskin pedesaan, dengan semangat itulah mereka tergugah agar tidak tertinggal dengan yang lain serta berlomba-lomba untuk membangun baik disumber daya manusianya maupun potensi ekonominya. Semangat, rasa tanggung jawab, gotong royong telah memberikan aspirasi untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya maka dengan mendapatkn bantuan PNPM-MPd ini diharapkan bisa memberikan perbaikan baik dibidang ekonomi, fisik, dan sumbar daya manusianya.

Program pengembangan kecamatan (PKK) yang merupakan program ini kemudian menjadi PNPM-MPd yang merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan, memperkuat

institusi lokal dan memperbaiki pemberian modal social kelompok masyarakat di pedesaan.

Seluruh proses kegiatan dalam PKK-PNPM yang saat ini di APM pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif yang mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunannya, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

2. Tujuan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum tujuan PPK/PNPM/DAPM adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembangan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program ini mempunyai tujuan pula sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Pemerintah lokal, serta

penyediaan prasarana sarana social dasar dan ekonomi. Sedangkan tujuan khusus ada 5 yaitu:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pemngambilan keputusan perencanaan, pelaksanaa, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
4. Menyediakan prasarana sarana social dasar dan ekonomi yang dipriorotaskan masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan keungan mikra dalam meberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin (RTM) (Indriani et al., 2020).

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan massayarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat hingga mempunyai mengelola sumber daya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanannya. Pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya memberikan akses pada sumber daya, sosial budaya, politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga masyarakat miskin dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Pemerintah sendiri menggunakan

strategi pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan mnyejahterahkan masyarakat itu sendiri. kerana dengan pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat tersebut di dorong dan diminta untuk mengandalkan kemampuan kepemilikan (Wibhisana, 2021).

Pemberdayaan masyarakat wajib melibatkan warga setempat sebagai aktor utama, kerana tujuan utama pemberdayaan masyarakat untuk melakukan peningkatan taraf hidup warga menjadi lebih baik lagi dengan memberikan pelatihan maupun lapangan pekerjaan dengan dengan memanfaatkan potensi wilayah yang ada sehingga dapat menjamin taraf hidup warga secara berkesinambungan (Santoso, 2018).

2.2.3. Teori Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Rahardja & Manurung (2010:266) Pendapatan merupakan total penerimaan berupa uang maupun bukan uang oleh seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu. Dalam bentuk yang bukan uang yang diterima oleh seseorang misalnya berupa barang, tunjangan beras, dan sebagainya. Penerimaan yang diterima tersebut berasal dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan usaha.

Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbed-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*) dan royalty (*royalty*) (Dwi Martani, 2016:204).

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat diperoleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharap keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut tidak menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi suatu periode pada hakekatnya pendapatan adalah penerimaan atau balas jasa dari faktor-faktor produksi (Helmalia & Afrinawati, 2018).

Pendapatan dibagi dua yaitu pendapatan bersih dan pendapatan yang telah mengalami pengurangan dari hasil produksi (Ramlan, 2006:41). Pendapatan adalah suatu pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya *owners equity*, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities* (Munandar, 2005:34).

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan perusahaan.

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Gaji dan Upah

Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.

2. Pendapatan dari usaha sendiri

Yaitu nilai total yang diperoleh dari hasil produksi yang telah dikurangi dengan beban-beban yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

3. Pendapatan dari Usaha Lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pension (Suparmoko dan Artaman, 2015:11).

3. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan.

Pengukuran pendapatan adalah pencatatan jumlah secara resmi kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statemen keuangan, pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kualitas keterukuran (*measurability*) dan keandalan (*realibility*). Berdasarkan waktu dan usahanya, pengakuan pendapatan tidak dapat disamakan satu lain. Perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mempunyai cara yang berbeda dalam pengakuan dan pencatatan pendapatannya. Pengakuan pendapatan tidak selalu dilakukan saat penjualan telah terjadi (Swardjono, 2013:34).

4. Unsur-Unsur Pendapatan

Unsur-unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari pendapatan yang diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
2. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oklkeh pihak lain.
3. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain perusahaan (Ham et al., 2018).

5. Sumber-sumber pendapatan

Pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa aspek dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan.
- b. Pendapatan non operasional pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal.
- c. Pendapatan luar biasa (extra ordinary) yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya tidak diharapkan terulang lagi dimasa yang akan datang (Baridwan, 2014:28-35).

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat Pendidikan dan pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat Pendidikan dan penggalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Pertiwi, 2015).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang yaitu:

1. Modal

Modal merupakan faktor yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang telah didirikannya.

2. Jam Kerja

Lama jam kerja yang digunakan seseorang maka akan tinggi tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut, dan sebaliknya jika semakin sedikit jumlah kerja yang digunakan oleh seseorang tersebut, dan sebaliknya jika semakin sedikit jam kerja yang digunakan oleh seseorang maka akan semakin sedikit tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut.

3. Pengalaman

Salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan usaha adalah kurangnya pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang berpengalaman dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, keberhasilan pedagang itu dapat diukur dari pendapatan yang diperoleh. Pengalaman diukur berdasarkan lama seorang pedagang tersebut melakukan usaha (Fatmawati et al., 2014).

7. Konsep Pendapatan (*Income*)

Ada tiga konsep pendapatan atau sumber penerimaan rumah tangga, yaitu:

1. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu:

- a. Keahlian (*skill*) merupakan kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan.
- b. Mutu modal manusia (*human capital*) merupakan kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik bakat bawaan (*Inborn*) maupun Pendidikan dan latihan.
- c. Kondisi kerja (*working conditions*) merupakan lingkungan dimana seseorang bekerja, penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, apa bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi.

2. Pendapatan dari aset produktif

Aset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atau balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, pertama, aset finansial (*financial assets*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan

atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan. Kedua, asset bukan finansial (*real assets*), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

3. Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*)

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Di negara-negara telah maju, penerima transfer diberikan (Pratama dan Manurung, 2010).

Adapun konsep perhitungan pada pendapatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan produksi (*production approach*) adalah perhitungan menghitung seluruh nilai tambah produksi, barang atau jasa yang dihasilkan dalam ukuran waktu tertentu.
2. Pendekatan pendapatan (*Income approach*) adalah menghitung seluruh jasa nilai balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi dalam ukuran waktu tertentu.
3. Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), adalah menghitung seluruh pengeluaran dalam kurun waktu tertentu (Arifini & Mustika, 2013).

8. Indikator Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari pemakaian capital dan pemberian jasa perorangan ataupun

keduanya berbentuk uang, barang, materi ataupun jasa selama jangka waktu tertentu (Hanum, 2017).

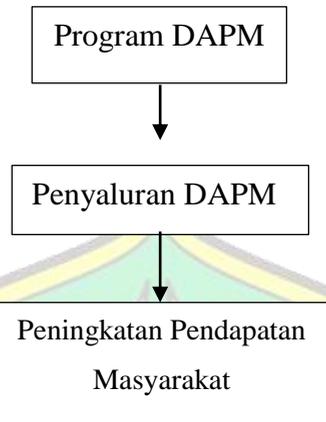
Ada beberapa indikator pendapatan yaitu:

1. Pendapatan atau penerimaan dari penjualan, jumlah uang yang diperoleh dari penjualan jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP), beban, dan biaya-biaya lainnya.
2. Dengan pendapatan maksimal kesejahteraan akan ikut meningkat, dengan adanya pendapatan maka dapat memenuhi kebutuhan hidup jauh lebih baik dari sebelumnya dan dapat merubah kesejahteraan menjadi lebih baik (Patty & Rita, 2015).

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan semua kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam sebuah kelompok yang dibentuk, kerangka pemikiran berguna untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis lebih mudah dan terarah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Kerangka Pikir



Program yang diteliti oleh penulis adalah DAPM pedesaan melalui programnya menyalurkan modal usaha dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang disalurkan kepada anggota kelompok, sehingga bantuan DAPM pedesaan ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi anggota kelompok SPP dalam pendapatan, perkembangan usaha.